



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-11/PB/PB.6/2022 22 Februari 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pencatatan Transaksi pada Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 dan SIMAK BMN Versi 21.1.0 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 *Unaudited*

Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Kepala/ Wakil Kepala/
Direktur Keuangan/ Deputi Kementerian Negara/Lembaga/ Jaksa Agung
Muda Bidang Pembinaan (sesuai daftar terlampir)

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 *Unaudited*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat kami nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2021 *Unaudited* diatur sebagai berikut:

Kategori K/L	Batas Waktu
K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker yang tidak memiliki belanja PC PEN	18 Februari 2022 (telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan)
K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker yang memiliki belanja PC PEN	28 Februari 2022
K/L dengan jumlah satker lebih dari 10 (sepuluh) satker	28 Februari 2022

2. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2021 *unaudited* tersebut, seluruh satker di K/L yang belum menerapkan seluruh modul SAKTI secara penuh menggunakan Aplikasi Persediaan versi 21.0.0 yang telah dituangkan dalam surat kami nomor S-17/PB/PB.6/2021 tanggal 7 Juli 2021 serta *update* Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN versi 21.1.0 yang telah dirilis melalui surat kami nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022.
3. Dalam penggunaan Aplikasi Persediaan versi 21.0.0 serta *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 21.1.0, ditemukan beberapa kendala di mana di antaranya memerlukan perbaikan aplikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan proses penyempurnaan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN. Namun demikian, *update* aplikasi dimaksud belum dapat dirilis kepada seluruh K/L dan akan digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2021 *audited*.
4. Permasalahan yang ditemukan oleh satker dalam penggunaan aplikasi dimungkinkan berbeda-beda sesuai dengan jenis transaksi dan kondisi data masing-masing satker. Untuk itu, bagi satker pada lingkup K/L yang wajib menyampaikan LKKL Tahun 2021 *unaudited* selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2022 dan mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi Persediaan versi 21.0.0 serta Aplikasi SIMAK BMN versi 21.1.0 dapat berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana dituangkan dalam lampiran surat ini, yang secara informal juga telah dikoordinasikan oleh Tim Teknis Pembina Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN melalui berbagai media.

5. Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker di lingkup K/L Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Barang Milik Negara
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
5. Para Kepala KPPN



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-11/PB/PB.6/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/ KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Daerah
3.	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Mahkamah Agung
5.	Kejaksaan Agung
6.	Kementerian Dalam Negeri
7.	Kementerian Luar Negeri
8.	Kementerian Pertahanan
9.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Kementerian Pertanian
11.	Kementerian Perindustrian
12.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13.	Kementerian Perhubungan
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
15.	Kementerian Kesehatan
16.	Kementerian Agama
17.	Kementerian Ketenagakerjaan
18.	Kementerian Sosial
19.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
21.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
23.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
25.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
26.	Kementerian Pariwisata RI
27.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
28.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
29.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	Kementerian Negara/Lembaga
31.	Badan Intelijen Negara
32.	Badan Siber dan Sandi Negara
33.	Dewan Ketahanan Nasional
34.	Badan Pusat Statistik
35.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
36.	Perpustakaan Nasional
37.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
38.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
39.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
40.	Lembaga Ketahanan Nasional
41.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
42.	Badan Narkotika Nasional
43.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
44.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
45.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
46.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
47.	Komisi Pemilihan Umum
48.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
49.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
50.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
51.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
52.	Badan Informasi Geospasial
53.	Badan Standardisasi Nasional
54.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
55.	Lembaga Administrasi Negara
56.	Arsip Nasional Republik Indonesia
57.	Badan Kepegawaian Negara
58.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
59.	Kementerian Perdagangan
60.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
61.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
62.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
63.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
64.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
65.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
66.	Ombudsman
67.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan

No.	Kementerian Negara/Lembaga
68.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
69.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
70.	Sekretaris Kabinet
71.	Badan Pengawas Pemilu
72.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
73.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
74.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
75.	Badan Keamanan Laut
76.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-11/PB/PB.6/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

Petunjuk Teknis (Alternatif Penyelesaian) Permasalahan dalam Penggunaan Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0

No	Kendala/Permasalahan	Alternatif Penyelesaian
1	Belum tersedia menu koreksi jumlah dan koreksi nilai persediaan.	<ul style="list-style-type: none">• Untuk transaksi koreksi jumlah (kuantitas) persediaan, satker dapat menggunakan menu Opname Fisik atau menu lain sesuai dengan transaksi yang mengalami kesalahan pencatatan. Apabila diperlukan, satker juga dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.• Untuk transaksi koreksi nilai persediaan, satker dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.
2	Terdapat perbedaan saldo antara Buku Persediaan dengan <i>Form</i> Transaksi.	<ul style="list-style-type: none">• Satker agar memastikan tidak terdapat saldo minus baik pada Buku Persediaan maupun <i>Form</i> Transaksi.• Perbedaan saldo ini dimungkinkan muncul karena satker melakukan perekaman beberapa transaksi perolehan persediaan dengan kode barang yang sama dalam 1 (satu) <i>Form</i> Transaksi Mutasi Masuk, dengan membedakan uraian pada kolom Keterangan sebagaimana contoh berikut:



No. Dokumen : 054010199123456000KP202100022M No. Bukti/BAST: 012
 Tanggal Dokumen : 20-12-2021 Tanggal Buku : 20-12-2021

Kode Persediaan : 1 01 03 01 001 000001 Pensil
 Jumlah Masuk : 10 Buah Akun : 521811
 Harga Beli Satuan : Rp. 6,500 Harga Total : Rp. 65,000
 Terbilang : ***ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH***

Keterangan : Pensil Deli

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah
1010301001-000001	Pensil	20
1010301001-000001	Pensil	12
1010301001-000001	Pensil	25
1010301001-000001	Pensil	10

Tambah Brg
 Ubah Brg
 Hapus Brg
 Selesai

No. Bukti Nama Barang
 Cari :

Cetak Tambah Ubah Keluar

- Untuk mengatasi permasalahan ini, satker agar melakukan perbaikan perekaman transaksi perolehan yang mengalami kesalahan prosedur pencatatan. Dalam hal telah terjadi transaksi lanjutan atas persediaan tersebut, satker agar melakukan penghapusan transaksi lanjutan, melakukan perbaikan perekaman transaksi perolehan, dan merekam kembali seluruh transaksi yang terjadi atas persediaan tersebut. Selanjutnya, lakukan pengecekan antara saldo persediaan antara Buku Persediaan dengan *Form* Transaksi.

3	Perbaiki formula FIFO pada transaksi opname fisik (keluar).	<ul style="list-style-type: none"> Satker agar memastikan bahwa transaksi Opname Fisik (keluar) yang direkam telah menghasilkan perhitungan yang sesuai, di mana nilai yang persediaan yang dikeluarkan berdasarkan urutan harga perolehan (FIFO). Dalam hal ditemukan perhitungan yang tidak sesuai, satker dapat merekam selisih kuantitas antara pembukuan dengan hasil opname fisik tersebut melalui menu Pemakaian. Jurnal yang dihasilkan antara transaksi Opname Fisik (keluar) dan transaksi Pemakaian sama, yaitu: <table border="1" data-bbox="1227 675 2040 831"> <tr> <td data-bbox="1227 675 1323 778">D</td> <td data-bbox="1323 675 2040 778">Beban Persediaan/ Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda/ Rusak/ Usang/ Pemeliharaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1227 778 1323 831">K</td> <td data-bbox="1323 778 2040 831">Persediaan</td> </tr> </table> 	D	Beban Persediaan/ Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda/ Rusak/ Usang/ Pemeliharaan	K	Persediaan
D	Beban Persediaan/ Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda/ Rusak/ Usang/ Pemeliharaan					
K	Persediaan					
4	Menu Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan, dan Daftar Transaksi Persediaan masih ditutup.	Satker agar mengoptimalkan penggunaan daftar, buku, dan laporan persediaan yang telah tersedia.				
5	Belum tersedia validasi transaksi opname fisik pada bulan Juni dan Desember.	Satker agar memastikan bahwa opname fisik telah dilakukan dalam rangka penyajian persediaan dalam LKKL Tahun 2021 <i>unaudited</i> , didukung dengan dokumen terkait (Berita Acara Hasil Opname Fisik).				
6	Transaksi perolehan suatu kode barang persediaan secara berturut-turut hingga lebih dari 20 <i>layer</i> persediaan tanpa transaksi mutasi keluar berdampak pada perhitungan FIFO yang tidak tepat.	Pada Aplikasi persediaan dengan metode FIFO, terdapat batas maksimal perekaman transaksi perolehan untuk satu kode barang secara berturut-turut sebanyak 20 <i>layer</i> . Kondisi ini tidak lazim karena satker melakukan mutasi masuk persediaan secara terus-				

		<p>menerus tanpa adanya transaksi mutasi keluar, sehingga terjadi penumpukan persediaan.</p> <p>Dalam hal terjadi kondisi ini, satker agar merekam transaksi mutasi masuk persediaan secara berturut-turut maksimal 20 <i>layer</i>, dilanjutkan dengan perekaman transaksi mutasi keluar. Selanjutnya, satker dapat merekam transaksi mutasi masuk persediaan kembali.</p>
--	--	---

*) Catatan:

Dalam hal penyelesaian permasalahan di atas memerlukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA, jurnal penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui *user* satker yang bersangkutan atau Satker Konsolidasi.

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-11/PB/PB.6/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

Petunjuk Teknis (Alternatif Penyelesaian) Permasalahan dalam Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN Versi 21.1.0

No	Kendala/Permasalahan	Alternatif Penyelesaian
1	Kode barang yang termasuk dalam kelompok 6.02.01 (Barang Bercorak Kesenian) selain 6.02.01.01.002 (Alat Musik Modern/Band) tervalidasi umur kosong (kriteria 10). Seharusnya kode barang tersebut tidak tervalidasi karena sesuai ketentuan yang berlaku barang-barang tersebut tidak disusutkan.	Bagi satker yang mengalami kondisi ini dapat mengabaikan hasil validasi, tidak perlu melakukan normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi atas barang-barang tersebut.
2	ATR yang menambah masa manfaat tervalidasi umur melebihi tabel masa manfaat (kriteria 10).	Bagi satker yang mengalami kondisi ini dapat mengabaikan hasil validasi, tidak perlu melakukan normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi atas barang-barang tersebut.
3	Aset yang semula merupakan barang ekstrakomptabel kemudian karena transaksi perubahan menjadi barang intrakomptabel tervalidasi aset tanpa perolehan awal (kriteria 7).	Bagi satker yang mengalami kondisi ini dapat mengabaikan hasil validasi, tidak perlu melakukan normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi atas barang-barang tersebut.
4	Satker yang pernah mengalami perubahan kode wilayah dan melakukan konversi kode wilayah pada Aplikasi SIMAK BMN, pada Aplikasi e-Rekon&LK terdapat data BMN dengan kode wilayah yang berbeda (kode wilayah lama dan baru). Atas kondisi	Untuk sementara, satker dapat mengabaikan permasalahan ini karena transaksi semu belum berdampak pada saldo yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan tahun 2021 <i>unaudited</i> .



	ini, Aplikasi SIMAK BMN belum menghasilkan Transaksi Semu secara sempurna, sehingga data pada e-Rekon&LK belum dapat dilakukan penyamaan dengan SIMAK BMN.	
5	Transaksi Semu berupa Perolehan, Perubahan, Penghapusan Umur belum terbentuk secara sempurna/lengkap.	Untuk sementara, satker dapat mengabaikan permasalahan ini karena transaksi semu belum berdampak pada saldo yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan tahun 2021 <i>unaudited</i> .
6	Pada beberapa satker, terbentuk kode jenis Transaksi Semu di luar yang telah ditentukan (sebagaimana diatur dalam S-3/PB/PB.6/2022).	Untuk sementara, satker dapat mengabaikan permasalahan ini karena transaksi semu belum berdampak pada saldo yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan tahun 2021 <i>unaudited</i> .
7	Satker dengan data berukuran besar tidak dapat memproses K3 menggunakan SIMAK BMN	Bagi satker yang mengalami kendala ini agar berkoordinasi dengan Tim Pembina (PIC) masing-masing K/L pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan/atau Direktorat Barang Milik Negara, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
8	Muncul jurnal NULL atas transaksi normalisasi aset kemitraan	Bagi satker yang mengalami kendala ini agar berkoordinasi dengan Tim Pembina (PIC) masing-masing K/L pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan/atau Direktorat Barang Milik Negara.

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-11/PB/PB.6/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

Penerapan Fitur Kertas kerja Konfirmasi (K3) dalam LKKL Tahun 2021 *Unaudited* beserta Pengembangan Lanjutan

1. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022 hal Rilis Aplikasi SAIBA Versi 21.1.0 dan SIMAK BMN Versi 21.1.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL *Unaudited* Tahun 2021, fitur Kertas Kerja Konfirmasi (K3) pada Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK digunakan untuk menyelesaikan data anomali BMN berupa:
 - a. Data BMN tidak normal
Atas data BMN tidak normal, Aplikasi SIMAK BMN melakukan validasi berdasarkan 17 kriteria, selanjutnya satker menindaklanjuti dengan berpedoman pada S-3/PB/PB.6/2022 (misalnya dengan melakukan normalisasi beserta input normalisasi atau hapus normalisasi).
 - b. Selisih data antara Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK
Atas data BMN yang mengalami perbedaan umur, kuantitas, nilai aset, nilai susut, serta nilai buku, Aplikasi SIMAK BMN membentuk transaksi semu untuk menyamakan data e-Rekon&LK berdasarkan data SIMAK BMN.
2. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2021 *unaudited*, seharusnya seluruh satker telah melakukan mekanisme K3 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 21.1 yang antara lain mencakup:
 - a. Mengunduh ADK K3 dari e-Rekon&LK yang berisi hasil validasi data detail BMN sampai dengan 31 Desember 2020 *audited*.
 - b. Mengunggah ADK K3 ke Aplikasi SIMAK BMN, sehingga terjadi validasi dan perbandingan data detail BMN.
 - c. Menindaklanjuti data BMN tidak normal.
 - d. Mengirimkan ADK SIMAK BMN yang telah membawa transaksi semu ke Aplikasi SAIBA dan e-Rekon&LK.
3. Setelah satker melakukan pengiriman data SIMAK ke Aplikasi SAIBA dan e-Rekon&LK, sesuai S-3/PB/PB.6/2022 satker dapat melakukan monitoring K3 melalui e-Rekon&LK, antara lain untuk memastikan bahwa:
 - a. *Upload* data tindak lanjut K3 berhasil.



- b. Tersedia data detail dan rekapitulasi tindak lanjut K3 beserta transaksi semu yang terbentuk.
- c. Tersedia informasi mengenai data BMN tidak normal sampai dengan 31 Desember 2020 *audited* (validasi K3 – 2020) dan sampai dengan 31 Desember 2021 (validasi K3 – 2021).
4. Sejak *update* Aplikasi SIMAK BMN versi 21.1.0 dirilis melalui S-3/PB/PB.6/2022, dilakukan penyesuaian menu Monitoring K3 pada e-Rekon&LK, antara lain sebagai berikut:
- a. Monitoring tindak lanjut (Tinjut) K3
- Submenu ini menyajikan informasi mengenai jumlah baris data *feedback* K3 dan transaksi semu yang diterima oleh e-Rekon&LK.

Monitoring Data Tindak Lanjut K3									
No	Kode	Nama Satker	Last Upload	Status BMN	Status ADK Tinjut K3	Jumlah Feedback K3	Jumlah Semu K3	Status Data Tinjut	Status Satker
1	02013.579166.000.KP	PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN	16-02-2022 18:50:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjut Berhasil	44.566	3	Ada Feedback Ada Semu K3	Satker Aktif
2	02011.634099.000.KP	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI	31-01-2022 15:12:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjut Berhasil	8.252	1	Ada Feedback Ada Semu K3	Satker Aktif
3	02011.412600.000.KP	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" JAKARTA	11-02-2022 15:59:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjut Berhasil	201.468	96.296	Ada Feedback Ada Semu K3	Satker Aktif
4	02001.130061.000.DK	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	04-02-2022 23:23:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjut Berhasil	64	3	Ada Feedback Ada Semu K3	Satker Inaktif Bersaldo

Keterangan:

- 1) Status ADK Tinjut K3: menunjukkan status *upload* ADK Tinjut K3 yang dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi. Status ini sama dengan yang terdapat pada submenu Monitoring ADK K3, namun mengeliminasi Proses Rekonsiliasi K3 dan Pembentukan Excel K3. Status ini tidak menunjukkan adanya data *feedback* K3 sehingga ADK Tinjut K3 kosong dapat memiliki status berhasil.
- 2) Jumlah Feedback K3: menunjukkan jumlah baris data K3 yang merupakan *feedback* dari Aplikasi SIMAK BMN. Feedback K3 merupakan data K3 2020 hasil perbandingan data antara Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK.
- 3) Jumlah Semu K3: menunjukkan jumlah baris data Transaksi Semu yang dikirimkan dari Aplikasi SIMAK BMN. Jika satker memiliki data K3 2020 yang masuk kategori Data Wajar Beda dan/atau Data Tidak Wajar Beda, seharusnya terdapat Transaksi Semu yang dikirimkan ke e-Rekon&LK.
- 4) Status Data Tinjut: menunjukkan ada tidaknya Feedback K3 dan Transaksi Semu K3.

b. Monitoring Tinjau K3 Non Ref

Submenu ini sama dengan submenu Monitoring Tinjau K3 namun diperuntukkan bagi satker non referensi.

Monitoring Data Tindak Lanjut K3 Satker Non Referensi								
No	Kode	Nama Satker	Last Upload	Status BMN	Status ADK Tinjau K3	Jumlah Feedback K3	Jumlah Semu K3	Status Data Tinjau
1	02403.020728.000.TP	-	07-02-2022 15:26:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	3	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
2	02403.030624.000.TP	-	07-02-2022 15:23:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	50	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
3	02403.031424.000.TP	-	07-02-2022 15:27:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	1	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
4	02403.032808.000.TP	-	07-02-2022 15:12:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	2	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
5	02403.100231.000.TP	-	08-02-2022 16:04:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	220	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
6	02403.140010.000.TP	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	07-02-2022 08:38:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	4.553	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3
7	02404.080626.000.TP	RSU ZEIN PAINAN	14-02-2022 15:36:22	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Upload Tinjau Berhasil	158	0	Ada Feedback Tidak Ada Semu K3

c. Monitoring K3 Per Akun

Submenu ini menyajikan dampak Transaksi Semu K3 terhadap Laporan Posisi BMN di Neraca per 6 (digit) kode akun neraca.

Monitoring K3 Per Akun								
No	Kode	Nama Satker	Akun	Uraian Akun	Jumlah	Jumlah Semu K3	Dampak K3	
1	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	135121	Aset Tetap Lainnya	247.451.300	247.451.300	0	
2	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-400.566.397.248	-400.566.397.248	0	
3	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	
4	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	134111	Jalan dan Jembatan	1.496.888.700	1.496.888.700	0	
5	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-401.164.972.035	-401.164.972.035	0	
6	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	169315	Akumulasi Amortisasi Software	-75.492.801.916	-75.492.801.916	0	
7	006.01.005016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	412.246.341.822	412.246.341.822	0	

Keterangan:

- 1) Jumlah: menyajikan data per akun Laporan Posisi BMN di Neraca sampai dengan 31 Desember 2021 tanpa Transaksi Semu K3.
- 2) Jumlah Semu K3: menyajikan data per akun Laporan Posisi BMN di Neraca sampai dengan 31 Desember 2021 termasuk dampak Transaksi Semu K3.
- 3) Dampak K3: menyajikan dampak Transaksi Semu K3 pada Laporan Posisi BMN di Neraca per akun.

d. Monitoring K3 Per Kode Barang

Submenu ini menyajikan dampak Transaksi Semu K3 terhadap data BMN yang disajikan per kode barang.

Monitoring K3 Per Kode Barang

No	Kode	Nama Sahber	Kode Barang	Uraian	Intra/Ekstra	Kuantitas Sd Desember 2021	Rph Aset Sd Desember 2021	Rph Susut Sd Desember 2021	Rph Buku Sd Desember 2021	Kuantitas Transaksi Semu K3	Rph Aset Transaksi Semu K3	Rph Susut Transaksi Semu K3	Rph Buku Transaksi Semu K3	Kuantitas Total	Rph Aset Total	Rph Susut Total	Rph Buku Total
1	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3050206999	Alat Rumah Tangga [Lainnya Home Use]	Intra	19	396.682.000	119.004.600	277.677.400	0	0	0	0	19	396.682.000	119.004.600	277.677.400
2	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3060102045	Trippod Camera	Ekstra	2	605.000	60.500	544.500	0	0	0	0	2	605.000	60.500	544.500
3	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3070101119	Pulse Oximeter	Ekstra	5	4.942.500	3.459.750	1.482.750	0	0	0	0	5	4.942.500	3.459.750	1.482.750
4	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	5020502002	Sumur Artistis	Intra	1	137.096.183	27.841.531	109.254.652	0	0	0	0	1	137.096.183	27.841.531	109.254.652
5	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3070110098	Premature Infant Incubator	Intra	1	42.746.000	42.746.000	0	0	0	0	0	1	42.746.000	42.746.000	0
6	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3030211002	Meteran Kain	Intra	1	16.332.800	16.332.800	0	0	0	0	0	1	16.332.800	16.332.800	0
7	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3070108041	Suction Unit For Endoscopy	Intra	4	177.374.400	177.374.400	0	0	0	0	0	4	177.374.400	177.374.400	0
8	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	Ekstra	6	4.182.200	522.774	3.659.426	0	0	0	0	6	4.182.200	522.774	3.659.426
9	006.01.05016	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	3150202999	Masker Lainnya	Intra	4	17.671.676	15.904.512	1.767.164	0	0	0	0	4	17.671.676	15.904.512	1.767.164

Keterangan:

- 1) Kuantitas, Rph Aset, Rph Susut, Rph Buku Sd Desember 2021: menyajikan data BMN per kode barang s.d. 31 Desember 2021 tanpa Transaksi Semu K3.
 - 2) Kuantitas, Rph Aset, Rph Susut, Rph Buku Transaksi Semu K3: menyajikan dampak Transaksi Semu K3 pada data BMN per kode barang.
 - 3) Kuantitas, Rph Aset, Rph Susut, Rph Buku Total: menyajikan data BMN per kode barang s.d. 31 Desember 2021 termasuk dampak Transaksi Semu K3.
5. Pemrosesan ADK K3 pada SIMAK BMN serta pengiriman data SIMAK BMN yang telah membawa Transaksi Semu K3 ke SAIBA dan e-Rekon&LK tidak secara otomatis berdampak pada laporan BMN dan/atau laporan keuangan yang dihasilkan oleh e-Rekon&LK, meskipun dampak Transaksi Semu K3 tersebut telah muncul pada Menu Monitoring K3 di e-Rekon&LK. Transaksi Semu K3 yang dihasilkan dan dikirimkan oleh Aplikasi SIMAK BMN diterima oleh e-Rekon&LK dan ditampilkan dalam tabel terpisah. Hingga saat ini, transaksi semu tersebut belum berdampak pada data BMN di e-Rekon&LK. Penyajian laporan BMN dan/atau laporan keuangan yang telah mencakup Transaksi Semu K3 pada Aplikasi e-Rekon&LK memerlukan proses pemutakhiran data secara serentak untuk seluruh K/L yang akan dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, laporan BMN dan laporan keuangan tahun 2021 *unaudited* belum mencakup transaksi semu dalam rangka penyamaan data antara SIMAK BMN dengan e-Rekon&LK. Transaksi semu sebagai dampak K3 akan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 *audited*.